

## **BKSAP Day:**

### **Diplomasi Parlemen krusial untuk kerja sama global SDGs**

Diplomasi Parlemen sebagai bagian dari Diplomasi Total krusial untuk mendorong kerja sama global percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (SDGs). Diplomasi Total merupakan diplomasi yang melibatkan segala pihak yang ada di suatu negara. Konsep tersebut juga telah terekam dalam sejarah kemerdekaan lewat pidato Bung Hatta, yang menginspirasi Menlu Hasan Wirajuda mendorong Diplomasi Total.

“Pada pidatonya 10 Desember 1945, Bung Hatta menyampaikan hanya dengan melibatkan secara aktif semua komponen bangsa, maka, diplomasi kita akan berhasil mencapai kepentingan kita. Bung Hatta juga memperkenalkan konsep diplomasi bebas aktif melalui konsep mendayung di antara dua karang,” jelas Ketua BKSAP, Fadli Zon saat menyampaikan paparannya dalam *BKSAP Day* yang dihelat di Rumah Dinas Walikota Padang Panjang, Sumatera Barat (28/11).

*BKSAP Day* yang diikuti oleh perwakilan mahasiswa/iSTIT Diniyyah Puteri, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat hingga santri Ponpes Thowalib Putra itu bertema *Diplomasi Parlemen Sebagai Bagian dari Diplomasi Total Indonesia*. Hadir pula dalam kesempatan itu Walikota Padang Panjang, Fadly Amran; Wakil Walikota Padang Panjang, Drs. Asrul; Wakil Ketua DPRD Kota Padang Panjang, Yulius Kaisar; Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, Mesra; Kepala Biro Pemerintahan Setda Prov Sumatera Barat, Ikbal Ramadi Prayana.

Ketua BKSAP menjelaskan diplomasi parlemen memiliki sejumlah fleksibilitas seperti pelaksanaannya yang bisa lebih lugas dan cair dalam menjalin hubungan dengan aktor negara lain. Terlebih diplomasi parlemen memiliki keunggulan lain dalam melakukan pendekatan ke negara-negara dengan sistem parlementer. “Banyak isu-isu antarnegara yang bisa difasilitasi Diplomasi Parlemen. Seperti dalam menjalin kerja sama dengan parlemen negara-negara kepulauan Pasifik Selatan, DPR memfasilitasinya dengan Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership (IPPP). Dari pertemuan yang digelar 2018 itu, banyak parlemen negara kepulauan pasifik selatan membuka dan terbuka akan sebuah negara bernama Indonesia,” beber politisi Gerindra itu.

Dalam sesi diskusi, sebagian besar peserta menggarisbawahi isu-isu terkait Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) sebagai hal yang perlu diperjuangkan khususnya dalam isu pendidikan dan penguatan tata kelola (anti korupsi). Hal ini tak lepas dari penyampaian Walikota Padang Panjang, Fadly Amran dalam sambutannya yang menerangkan kotanya merupakan pilar pendidikan islam dan telah sejak lama selalu mengirim siswa/i lulusan sekolah setempat ke tempat pendidikan agama yang lebih luas di berbagai belahan dunia seperti Universitas Al-Azhar, Mesir hingga negara Timur Tengah lainnya.

Para peserta dari beberapa perguruan tinggi mengangkat isu pendidikan dan bagaimana narasi BKSAP untuk mendorong pendidikan untuk semua. Ketua BKSAP

menanggapi isu pendidikan maupun anti-korupsi dengan menguraikan kedua hal tersebut menjadi bagian fokus diplomasi BKSAP dalam bungkus SDGs. “Pendidikan merupakan kunci dari semua. Tetapi kerap juga di negara kita dan lainnya, pendidikan menjadi awal dari stratifikasi sosial. Hal ini tentu merugikan apabila pendidikan tidak merata baik kesempatan dan mutu. Semangat SDGs adalah *Quality education for all*,” lanjut Fadli Zon.

Untuk itu, BKSAP mendorong penguatan kerja sama dan berbagi praktik baik dalam pencapaian SDGs khususnya isu pendidikan dan anti-korupsi. Dalam berbagai forum hal terkait percepatan pencapaian SDGs selalu disuarakan. Melalui penguatan kerja sama, manfaatnya dapat turun ke level nasional. Termasuk dalam hal berbagi praktik cerdas, maka, akan terjadi inovasi kebijakan yang dapat disesuaikan dengan situasi lokal yang terinspirasi dari ragam komunikasi global.